

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Industri Kecil dan Menengah (IKM) berperan cukup besar terhadap perekonomian Indonesia. Selama lima tahun terakhir (2011-2016) kontribusi sektor IKM terhadap pertumbuhan industri non-migas meningkat dari 57,84 persen menjadi 60,34 persen. Selanjutnya, ekspor IKM periode Januari-November 2016 mencapai 24,7 miliar dollar AS atau memberikan kontribusi 24,8 persen terhadap total ekspor industri non-migas.

Industri Kecil dan Menengah juga mampu menyerap tenaga kerja paling banyak dibandingkan sektor lainnya. Serapan tenaga kerja pada sektor ini pada awal tahun 2016 mencapai 97,22 persen (Tarmizi, 2016). Keberadaan IKM juga menjadi salah satu roda penggerak perekonomian di Jawa Barat. Tercatat hingga tahun 2014, jumlah IKM di Jawa Barat mencapai angka 201.997 unit usaha. Selain itu keberadaan IKM mampu menyerap tenaga kerja hingga 4.796.242 orang (Fatiman, 2016).

IKM adalah usaha yang mempunyai ketahanan akan krisis ekonomi. Pada saat krisis tahun 1998, IKM bisa bertahan dari keterpurukan, bahkan jumlahnya semakin meningkat setelah terjadinya krisis. Ada beberapa penyebab IKM bisa bertahan di masa krisis yaitu tidak memiliki pinjaman ke bank dan pinjaman luar negeri, serta menggunakan bahan sumber daya lokal, baik bahan baku, sumber daya manusia, dan peralatan (Thahir, 2013). Alasan lain adalah karena sektor formal banyak memberhentikan pekerjaannya sehingga para penganggur tersebut memasuki sektor informal dengan melakukan kegiatan usaha yang berskala kecil. Kondisi tersebut menyebabkan jumlah IKM meningkat (Partomo dan Soejodono, 2004).

Kabupaten Bandung merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat yang memiliki jumlah IKM yang cukup signifikan. Menurut Kepala Dinas Koperasi, Perdagangan, dan Perindustrian (Diskoperindag) Kabupaten Bandung, tak kurang dari 10 ribu IKM saat ini tengah beroperasi di wilayah Kabupaten Bandung (Permana, 2017). Peran IKM di Kabupaten Bandung terhadap *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB) sangat signifikan. Menurut Biro Pusat Statistik Kabupaten Bandung, pada tahun 2014, sektor industri pengolahan (termasuk di dalamnya sektor IKM) merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Bandung.

Dalam struktur organisasi Diskoperindag Kabupaten Bandung, industri pengolahan (IKM) dibedakan atas IKM bidang Aglomera yang meliputi Logam, Mesin, Elektronik, Industri Agro dan Kimia & Bahan Bangunan serta IKM bidang Aneka yang meliputi Tekstil & Produk Tekstil (TPT), Kulit & Produk Kulit (KPK) dan Kerajinan & Aneka (KDA). TPT, KPK dan KDA merupakan kontributor terbesar pada sektor industri pengolahan sehingga sedikit saja terjadi perubahan pada sub sektor tersebut akan memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap sektor industri pengolahan.

Agar terus dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDRB Kabupaten Bandung, Diskoperindag Kabupaten Bandung secara konsisten berupaya untuk mengembangkan IKM Kabupaten Bandung, terutama IKM bidang Aneka. Berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional 2015-2035, industri tekstil, barang dari kulit, alas kaki, dan aneka merupakan industri andalan, yaitu industri prioritas yang akan berperan besar sebagai penggerak utama (*prime mover*) perekonomian di masa yang akan datang (Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perindustrian, 2015). Dengan demikian upaya Diskoperindag Kabupaten Bandung untuk mengembangkan IKM bidang Aneka sejalan dengan Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional 2015-2035. Namun demikian Diskoperindag Kabupaten Bandung memiliki keterbatasan anggaran, sehingga mengharuskan memilih IKM yang akan diprioritaskan untuk dikembangkan.

Prioritas pengembangan IKM bidang Aneka di Kabupaten Bandung saat ini dilakukan oleh Diskoperindag Kabupaten Bandung dengan cara memberikan pelatihan secara periodik kepada setiap IKM di masing-masing kecamatan atau di kantor Diskoperindag. Selain itu bantuan diberikan dalam bentuk peralatan atau modal kepada IKM bidang Aneka yang aktif. Dengan demikian maka hanya IKM bidang Aneka yang aktif berpeluang untuk mendapatkan fasilitas dari Diskoperindag. IKM yang aktif adalah IKM yang selalu mengikuti kegiatan atau pelatihan yang diselenggarakan oleh Diskoperindag di wilayah kecamatan maupun di kabupaten. IKM tersebut juga aktif dalam pengajuan proposal untuk bantuan modal maupun bantuan peralatan. IKM yang termasuk kategori aktif saat ini adalah IKM baju muslim, alas kaki kulit dan kerajinan bambu.

Di sisi lain, IKM bidang Aneka yang tidak aktif memiliki peluang yang sangat kecil untuk mendapatkan fasilitas, walaupun IKM tersebut berpotensi untuk berkembang. IKM tersebut dapat dikatakan berpotensi karena memenuhi beberapa

kriteria dalam Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2014. Oleh karena itu IKM ini sulit untuk berkembang. Terkait dengan peraturan tersebut, maka selayaknya Diskoperindag melihat IKM bidang Aneka dari berbagai kriteria dalam memprioritaskan pengembangan IKM.

1.2 PERUMUSAN MASALAH

Pengembangan IKM bidang Aneka harus dilakukan dengan memperhatikan produk yang dihasilkannya adalah merupakan produk unggulan daerah atau yang memiliki potensi sebagai unggulan. Pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 telah menetapkan 12 kriteria Produk Unggulan Daerah. Penentuan IKM bidang Aneka yang akan diprioritaskan untuk dikembangkan melibatkan beberapa pihak terkait di Diskoperindag Kabupaten Bandung sebagai pengambil keputusan. Permasalahan yang terjadi jika melibatkan banyak pengambil keputusan adalah adanya perbedaan persepsi.

Metode yang sesuai untuk penentuan prioritas pengembangan IKM bidang Aneka dengan multi kriteria adalah metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Metode AHP membantu memecahkan persoalan yang kompleks dengan menyusun suatu hirarki kriteria, dinilai secara subjektif oleh pihak yang berkepentingan lalu menarik berbagai pertimbangan guna menghasilkan bobot prioritas.

Berdasarkan uraian di atas, pokok permasalahan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana menggunakan kriteria produk unggulan dalam menilai kondisi IKM bidang Aneka di Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana membuat urutan prioritas dalam memilih IKM bidang Aneka yang akan dipertimbangkan untuk dikembangkan oleh Diskoperindag Kabupaten Bandung?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah memberikan usulan pengambilan keputusan mempertimbangkan penentuan prioritas pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) bidang Aneka di Kabupaten Bandung.

1.4 PEMBATASAN MASALAH

Agar penelitian dapat lebih terarah dilakukan pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Kriteria penentuan prioritas pengembangan Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Bandung mengacu pada 12 kriteria Produk Unggulan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014.
2. Responden penelitian adalah pihak Diskoperindag Kabupaten Bandung yang merupakan pengambil keputusan dalam pemilihan IKM bidang Aneka di Kabupaten Bandung serta pelaku IKM bidang Aneka.
3. IKM bidang Aneka yang diteliti adalah yang beroperasi pada tahun 2017.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan penelitian ini dibagi menjadi enam bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian, dan sistematika penulisan. Latar belakang masalahnya adalah perlunya pengembangan IKM yang efektif agar IKM mampu berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian Kabupaten Bandung. Rumusan masalahnya adalah perlunya penentuan IKM bidang Aneka yang akan diprioritaskan pengembangannya karena jumlah dan sektor IKM bidang Aneka di Kabupaten Bandung yang beragam. Penentuan IKM bidang Aneka tersebut melibatkan multi partisipan dan multi kriteria sehingga menggunakan Metode AHP. Tujuan penelitian ini adalah menentukan IKM bidang Aneka yang akan diprioritaskan pengembangannya untuk kemajuan perekonomian Kabupaten Bandung. Penelitian dibatasi menggunakan kriteria produk unggulan dan responden penelitian adalah pihak Diskoperindag dan IKM bidang Aneka.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori yang relevan dengan penelitian, teori tersebut antara lain tentang IKM, *Multiple Criteria Decision Making* (MCDM), metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP), metode *Analytic Network Process* (ANP), desain sampling, dan teknik pengumpulan data.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi langkah-langkah yang dilakukan untuk memecahkan masalah penelitian. Setelah perumusan masalah ditetapkan langkah selanjutnya adalah tinjauan pustaka, pemilihan metode penelitian, pemilihan kriteria produk unggulan, penyusunan dan penyebaran kuesioner, pengumpulan dan pengolahan data, analisis, penarikan kesimpulan dan saran.

BAB IV : PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

Bab ini berisi hasil pengumpulan dan pengolahan data. Data yang dikumpulkan berupa data matriks perbandingan berpasangan dan data IKM yang diteliti. Data yang diperoleh tersebut diolah dengan menggunakan Metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dan penilaian IKM bidang Aneka.

BAB V : ANALISIS

Bab ini berisi analisis hasil pengumpulan dan pengolahan data. Analisis dilakukan terhadap hasil pembobotan kriteria dan hasil penilaian kondisi IKM bidang Aneka.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi hasil akhir yang dicapai dalam penelitian serta saran bagi penelitian selanjutnya dan saran bagi Diskoperindag Kabupaten Bandung terkait penentuan IKM yang akan diprioritaskan untuk dikembangkan di Kabupaten Bandung.